

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

MUHAMMAD MARIO ARANDI



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD MARIO ARANDI
A011191186



kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD MARIO ARANDI
A011191186

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 11 April 2023

Pembimbing I



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF
NIP. 19660811 199103 2 001

Pembimbing II



Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF
NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

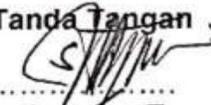
ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

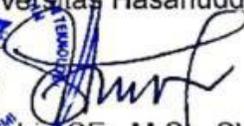
disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD MARIO ARANDI
A011191186

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 11 April 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|------------|--|
| 1. | Dr. Sri Undai Nurbayani, SE.,M.Si.,CPF | Ketua | 1.....  |
| 2. | Dr. Hamrullah, SE., M.Si.,CSF | Sekretaris | 2.....  |
| 3. | Dr. Agussalim, SE., M.Si. | Anggota | 3.....  |
| 4. | Randi Kurniawan, SE.,M,Sc | Anggota | 4.....  |

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir SE. M.Si. CWM
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD MARIO ARANDI
Nomor Pokok : A011191186
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Determinan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 April 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Mario Arandi

A011191186

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**”. Adanya skripsi ini merupakan sebagai bukti penulis untuk menghasilkan karya ilmiah untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa ada bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis selama menempuh masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas kehendak serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Kedua orang tua penulis, (Alm.) Hariyanto sebagai ayahanda saya dan Sakaria Pati sebagai ibunda saya, penulis sangat berterimakasih atas didikan, motivasi, semangat, serta doa yang kalian berikan sehingga penulis dapat meraih salah satu cita-cita yang telah penulis dambakan dari kecil. Untuk ayah penulis, saya

ingin berkata bahwa penulis sudah memulai langkah kecil untuk menjadi anak kebanggaan serta dapat membahagiakan Ibunda penulis. Untuk ibunda penulis, saya ingin berkata bahwa saya mencintai dan bersyukur bahwa selama hidupnya penulis beliau tidak pernah menyerah dalam memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat berada di titik ini.

3. Kakak dan adik penulis Siti Airinda Marennu S.IP. M.Si dan juga Syifa Aininda Sagena, terimakasih untuk selalu berjuang dan memberikan penulis motivasi untuk bisa sukses dan berhasil di masa depan. Semoga kita bertiga bisa menjadi sukses dan menjadi anak kebanggaan bagi orang tua kita.
4. Ibu Suyamtini, Pak Mudjiyanto, Brama Wijaya, dan Prabu Brawijaya yang telah memberikan dukungan moral dari jauh serta doa-doa yang kalian haturkan membantu penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk bantuannya yang kalian berikan selama penulis menempuh masa studi di Universitas Hasanuddin semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian berlipat ganda.
5. Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani SE., M.Si., CPF dan Bapak Dr. Hamrullah SE.,M.Si.,CSF sebagai pembimbing I dan pembimbing II penulis. Terimakasih atas saran dan kritik serta kesabaran dalam membimbing penulis untuk mewujudkan skripsi ini, penulis berdoa semoga Allah SWT melindungi dan memberikan Ibu Sri dan juga Pak Hamrullah rezeki dan kesehatan agar bisa tetap memberikan ilmu dan arahan kepada mahasiswa lain selain penulis.
6. Bapak Dr. Agussalim SE., M.Si dan Bapak Randi Kurniawan SE., M.Sc sebagai penguji telah memberikan saran dan kritik yang membangun selama proses ujian

seminar proposal dan juga seminar hasil, dalam saran dan kritik tersebut memberikan penulis pengetahuan serta ilmu baru.

7. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasehat dan arahan selama proses pendidikan penulis, semoga Allah SWT memberikan kesehatan agar tetap bisa berdedikasi tinggi untuk selalu memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi FEB-UNHAS
8. Nirsyah Nur Afia yang telah membantu dan menemani serta memberikan doa kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berdoa semoga harapan dan cita-cita anda di masa depan dapat terwujud dan menjadi orang sukses di masa depan, agar bisa menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga.
9. Teman-teman F.O.R.M.I.G.A terimakasih atas kenangan dan momen-momen yang berharga selama perkuliahan semoga kalian semua bisa sukses dan berhasil di masa depan.
10. Teman-teman kabinet PRIORITAS HIMAJIE, terimakasih atas kerja keras dan juga kerja sama selama kepengurusan berlangsung. Penulis bisa belajar untuk memimpin dan mengatur waktu serta berkoordinasi dengan baik.
11. Teman-teman Departemen Keilmuan Harol, Ardi, Yola, Angel, Cia, dan Eri atas kerjasamanya dan juga momen-momen selama berproses dalam kepengurusan. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kalian di masa depan
12. Keluarga Besar HIMAJIE yakni kakak-kakak ESPADA, SPARK, PRIMES, ANTARES, SPHERE, ERUDITE dan LANTERN serta adik-adik RIVENDELL dan SANCTUARY, terimakasih telah menghadirkan momen yang berharga selama penulis berkuliah. HIMAJIE menjadi wadah kita semua untuk berkumpul, belajar, dan bersuka cita untuk menikmati dan melalui proses kuliah kita semua.

13. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang juga memberikan doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca terhadap penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru untuk kita semua. Aamiin.

Makassar, 11 April 2023

Muhammad Mario Arandi

ABSTRAK

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Mario Arandi

Sri Undai Nurbayani

Hamrullah

Ketimpangan wilayah merupakan sebuah masalah ekonomi yang umum di negara berkembang, dimana adanya ketimpangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal. Masalah ketimpangan wilayah menjadi salah satu alasan utama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemerataan pembangunan di 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah, investasi, dan indeks pembangunan manusia yang merupakan instrumen penting dalam mengurangi tingkat ketimpangan wilayah. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan "*fixed effect*" dan dalam kurun waktu 2016-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pengurangan tingkat ketimpangan wilayah. Sedangkan untuk variabel investasi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan wilayah, hal ini disebabkan karena investasi dan indeks pembangunan manusia yang belum merata antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Ketimpangan Wilayah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

ANALYSIS DETERMINANTS OF REGENCY/CITY INEQUALITY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Muhammad Mario Arandi

Sri Undai Nurbayani

Hamrullah

Regional inequality is a common economic problem in developing countries, where there is an imbalance in the level of social welfare in developed regions with lagging regions. The problem of regional inequality is one of the main reasons for the South Sulawesi Provincial government to carry out an equitable distribution of development in 24 districts/cities in South Sulawesi Province. Therefore, this study aims to analyze the impact of government spending, investment, and the human development index which are important instruments in reducing regional inequality. Data were analyzed using panel data regression with a "fixed effect" approach in the period 2016-2021. The results of the study show that the variable government spending does not effect reducing regional inequality. As for the investment variable and the human development index, it has a positive and significant influence on the level of regional inequality, this is because the investment and human development index are not evenly distributed among regency/city in South Sulawesi Province.

Keywords: Regional Inequality, Government Spending, Investment, Human Development Index

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| PRAKATA | vi |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Tinjauan Teoritis | 9 |
| 2.1.1 Ketimpangan Wilayah | 9 |
| 2.1.2 Pengeluaran Pemerintah | 13 |
| 2.1.3 Investasi | 14 |
| 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia | 17 |
| 2.2 Hubungan Antar Variabel..... | 18 |
| 2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Wilayah | 18 |
| 2.2.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Wilayah..... | 19 |
| 2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Wilayah | 20 |
| 2.3 Studi Empiris | 21 |
| 2.4 Kerangka Konseptual | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5 Hipotesis Penelitian | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1 Ruang Lingkup Penelitian | 27 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data..... | 27 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 27 |
| 3.4 Metode Analisis Data | 28 |
| 3.4.1 Indeks Theil | 28 |
| 3.4.2 Regresi Data Panel | 29 |
| 3.4.3 Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data | 30 |
| 3.4.4 Estimasi Regresi Data Panel | 31 |
| 3.5 Definisi Operasional Variabel..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| 4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian | 34 |
| 4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Sulawesi Selatan | 34 |
| 4.1.2 Kependudukan | 35 |
| 4.1.3 Perkembangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan | 36 |
| 4.2 Perkembangan Variabel Penelitian..... | 39 |
| 4.2.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan | 39 |
| 4.2.2 Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan..... | 47 |
| 4.2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan | 50 |
| 4.2.4 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan | 52 |
| 4.3 Analisis Data..... | 57 |
| 4.3 Pengujian Model Regresi Data | 57 |
| 4.3.1 Uji Chow | 58 |
| 4.3.2 Uji Hausman | 59 |
| 4.4 Hasil Estimasi | 60 |
| 4.5 Pembahasan Hasil Penelitian | 63 |

| | |
|--|-----------|
| 4.5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Wilayah | 63 |
| 4.5.2 Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah | 64 |
| 4.5.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Wilayah | 65 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| 5.1 Kesimpulan | 66 |
| 5.2 Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN | 71 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021..... | 3 |
| Tabel 4.1 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2016-2021..... | 40 |
| Tabel 4.2 Rincian Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021..... | 41 |
| Tabel 4.3 Rincian Pengeluaran Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021..... | 43 |
| Tabel 4.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)..... | 45 |
| Tabel 4.5 Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)..... | 49 |
| Tabel 4.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021..... | 52 |
| Tabel 4.7 Hasil Analisis Indeks Theil Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Theil Within) Tahun 2016-2021..... | 53 |
| Tabel 4.8 Hasil Indeks Theil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Theil <i>Between</i>) Tahun 2016-2021..... | 55 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.9 Hasil Indeks Theil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021..... | 56 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Chow..... | 59 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Hausman..... | 60 |
| Tabel 4.12 Hasil Estimasi Regresi..... | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... | 25 |
| Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021..... | 35 |
| Gambar 4.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021..... | 37 |
| Gambar 4.3 Rata-Rata Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021..... | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan dari masalah ketimpangan, kemiskinan, dan juga pengangguran. Tiga faktor ini merupakan permasalahan ekonomi utama yang dialami oleh negara-negara berkembang, dengan menurunnya tingkat ketimpangan, jumlah penduduk miskin, dan pengangguran maka dapat dikatakan bahwa pembangunan di daerah tersebut berhasil. (Todaro & Smith, 2003).

Hubungan antara pembangunan dan ketimpangan telah menjadi topik diantara para ahli ekonomi semenjak beberapa dekade lalu. Kuznets (1955) memiliki sebuah teori dimana korelasi antara pembangunan dan ketimpangan mengambil bentuk seperti U-terbalik (*inverted U-curve*), ketika di awal pembangunan maka akan terjadi ketimpangan yang semakin lebar akibat konsekuensi dari pembangunan yang terjadi. Setelah itu pada titik tertentu ketimpangan akan berkurang seiring perekonomian yang membaik akibat dari pembangunan yang dilakukan.

Kualitas pembangunan menjadi salah satu faktor bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan kualitas kehidupan yang baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar hidup. Oleh karenanya, ketimpangan yang terjadi di masyarakat dapat memberikan dampak buruk seperti ekonomi yang tidak efisien, stabilitas sosial dan solidaritas yang lemah (Todaro & Smith, 2003).

Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan ekonomi. Menurut Subandi (2012) pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*Income per-kapita*) dalam jangka panjang. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan harapannya kemiskinan dan ketimpangan wilayah dapat berkurang.

Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari negara Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.139.531 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021) yang tersebar di 24 kota/kabupaten menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dari kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan sumber daya alam dan karakteristik wilayah yang dimiliki tiap daerah menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengatasi masalah ketimpangan wilayah yang terjadi. Akibat perbedaan karakteristik wilayah yang ada maka dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang di masing-masing wilayah.

Untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat perlu meningkatkan kemampuan wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, dengan kemampuan wilayah yang meningkat dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian dan standar hidup masyarakat.

Adapun laporan jumlah penduduk dan PDRB perkapita masing-masing kabupaten/kota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2021 disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

| Kabupaten/Kota | % Penduduk | | PDRB |
|------------------|-----------------|----------|--------------------|
| | Penduduk (jiwa) | Penduduk | Perkapita (rupiah) |
| Selayar | 137,974 | 1.50 | 27,287,749.87 |
| Bulukumba | 440,090 | 4.81 | 20,479,901.84 |
| Bantaeng | 197,886 | 2.16 | 31,083,553.16 |
| Jeneponto | 405,508 | 4.43 | 17,405,328.62 |
| Takalar | 302,695 | 3.31 | 22,821,652.16 |
| Gowa | 773,315 | 8.46 | 19,452,616.33 |
| Sinjai | 261,366 | 2.85 | 28,986,172.65 |
| Maros | 396,924 | 4.34 | 31,240,237.43 |
| Pangkep | 348,230 | 3.81 | 50,254,142.38 |
| Barru | 185,525 | 2.02 | 27,322,463.28 |
| Bone | 806,750 | 8.82 | 28,847,846.30 |
| Soppeng | 235,574 | 2.57 | 32,197,950.54 |
| Wajo | 379,396 | 4.15 | 35,764,741.85 |
| Sidrap | 323,194 | 3.53 | 27,432,439.96 |
| Pinrang | 407,371 | 4.45 | 33,070,591.67 |
| Enrekang | 227,520 | 2.48 | 21,466,244.73 |
| Luwu | 367,454 | 4.02 | 28,436,212.42 |
| Tana Toraja | 285,179 | 3.12 | 16,761,402.49 |
| Luwu Utara | 325,052 | 3.55 | 26,121,974.33 |
| Luwu Timur | 300,511 | 3.28 | 53,342,473.32 |
| Toraja Utara | 264,145 | 2.89 | 20,280,527.74 |
| Makassar | 1,427,619 | 15.62 | 88,477,387.87 |
| Parepare | 152,922 | 1.67 | 33,749,231.63 |
| Palopo | 187,331 | 2.04 | 30,790,419.10 |
| Sulawesi Selatan | 9,139,531 | 100.00 | 37,573,262.79 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (data diolah)

PDRB perkapita atau pendapatan perkapita memiliki kegunaan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum, yang dimana semakin besar angka PDRB perkapita semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut (Sukirno, 2004)

Melihat tabel 1.1 hanya tiga wilayah saja yang memiliki PDRB perkapita diatas rata-rata provinsi yaitu Makassar (88,47 juta), Luwu Timur (53,34 juta), serta Pangkajene dan Kepulauan (50,25 juta). 21 daerah lainnya berada dibawah rata-rata provinsi yang dimana PDRB perkapita terendah berada di wilayah Tana Toraja (16,76 juta) disusul oleh Jeneponto (17,40 juta), Gowa (19,40 juta) dan Bulukumba (20,74 juta).

Berdasarkan dari tabel 1.1 juga dapat diketahui bahwa masih banyak wilayah di Sulawesi Selatan yang tertinggal sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini terjadi disebabkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan tidak merata sehingga sebagian besar dari wilayah yang ada di Sulawesi Selatan memiliki PDRB perkapita yang rendah.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah Sulawesi Selatan bisa meningkatkan pengeluaran pemerintah agar infrastruktur dan kualitas pendidikan serta kesehatan dapat merata di tiap wilayah. Hal ini karena pemerintah memiliki peranan dalam mengelola keuangan daerah untuk kepentingan bersama sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Lebih lanjut pada pasal 26 dan 27 dijelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selain pengeluaran pemerintah, investasi juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, peranan investasi dalam perekonomian adalah sebagai faktor produksi yang meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah sehingga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) meningkat yang akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Investasi merupakan salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gulirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Suindyah, 2011).

Umumnya, investasi berfokus pada peningkatan modal fisik seperti bangunan, mesin-mesin produksi dan lain sebagainya sebagai faktor produksi untuk meningkatkan output, namun investasi tidak terbatas dengan pembentukan modal fisik saja melainkan juga ada pembentukan modal manusia (*human capital*) yang

menjadi subjek dari investasi. Jhingan (2014) mengungkapkan pembentukan modal manusia sendiri adalah sebuah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Karena pada dasarnya modal fisik akan lebih optimal penggunaannya apabila kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Pembentukan modal manusia berkaitan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikembangkan oleh Romer (1990) dalam penelitiannya menyatakan bahwa investasi dalam sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan kontributor signifikan dalam pertumbuhan ekonomi terutama dalam penggunaan teknologi yang semakin maju maka memerlukan pengetahuan serta inovasi yang lebih matang sehingga produktivitas produksi semakin efisien.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengeluaran pemerintah dan investasi dapat membantu mengoptimalkan rencana serta pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti ketimpangan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Berapa besar pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Berapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disajikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembuat kebijakan, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kalangan akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan kajian literatur untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan ketimpangan wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Ketimpangan Wilayah

Menurut Sirojuzilam (2005) ketimpangan wilayah adalah ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu Negara. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik, sumberdaya, dan keadaan demografis wilayah yang berbeda. Dampak dari ketimpangan wilayah tersebut mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Mubyarto (1995) membedakan ketimpangan menjadi 3, yaitu: ketimpangan antar sektor, yaitu seperti antar sektor industri dan sektor pertanian, ketimpangan antar daerah, dimana ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki, ketimpangan antar golongan ekonomi. ketimpangan jenis ini merupakan jenis yang paling berat dan sangat mungkin terjadi di dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal ataupun kapitalis.

Secara teori, permasalahan ketimpangan antarwilayah dapat dijelaskan menggunakan Hipotesis Neoklasik. Penganut Hipotesis Neoklasik menyatakan pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Bila proses pembangunan berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan antarwilayah akan menurun. Hal tersebut dikarenakan pada waktu

proses pembangunan baru dimulai, peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik.

Sedangkan daerah yang tertinggal tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan, maka ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat. Keadaan yang berbeda terjadi di negara maju dimana kondisi daerahnya umumnya dalam kondisi yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitas SDM. Dalam kondisi demikian, setiap peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antardaerah.

Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah (Anggraeni, 2012). Bort dalam Sjafrizal (2008) menjadi pelopor yang mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi Neoklasik, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya.

Sedangkan kegiatan produksi pada suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Bort menyatakan pada awal pembangunan suatu negara, antar wilayah cenderung meningkat. Hal ini disebabkan mobilitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) kurang berjalan lancar.

Dampaknya modal dan tenaga kerja akan terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan antarwilayah melebar (*divergen*). Bila pembangunan

terus berlanjut, dengan semakin baiknya fasilitas maka mobilitas faktor produksi semakin lancar sehingga ketimpangan antar wilayah akan berkurang (*convergen*).

Menurut Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*trickle down effects*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas.

Faktor-faktor penyebab ketimpangan wilayah ialah pertumbuhan ekonomi, investasi, aglomerasi, dan tingkat pengangguran. Faktor tersebut memiliki peran vital terhadap kemampuan dan kualitas wilayah dalam memproduksi barang dan jasa (Sjafirzal, 2012). Indikasi ketimpangan wilayah dapat dilihat dari kesejahteraan dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Myrdal (1957) menjelaskan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar wilayah yang berlebihan dapat menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) yang mana akan mendominasi pengaruh yang lebih menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan suatu wilayah, yang mana akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat dan bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, pembangunan wilayah harus difokuskan

untuk membawa dampak *spread effect* yang menguntungkan wilayah sekitarnya sehingga ketimpangan dapat berkurang.

Ketimpangan wilayah dapat diukur dengan alat analisis tertentu untuk mengetahui seberapa parah ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut, alat analisis yang digunakan untuk pengukuran ketimpangan wilayah ialah:

a.) Indeks Williamson

Dalam bukunya Sjafrizal (2012) menjelaskan indeks williamson merupakan model yang cukup representatif dalam menghitung ketimpangan wilayah. Indeks Williamson dikembangkan oleh ahli ekonomi Williamson pada tahun 1965 yang menggunakan komponen PDRB perkapita wilayah dan jumlah penduduk sebagai indikator untuk melihat tingkat ketimpangan wilayah terkait., dengan nilai indeks berkisar antara 0-1. Dimana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut memiliki ketimpangan rendah, apabila mendekati angka satu maka ketimpangan wilayah tersebut tinggi.

b.) IndeksTheil

Indeks Theil merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah dengan memiliki keunggulan untuk melihat tingkat ketimpangan dalam wilayah dan antar wilayah, indeks ini menggunakan komponen PDRB perkapita wilayah dan juga jumlah penduduk sama seperti indeks williamson (Sjafrizal, 2018).

Interpretasi indeks theil ialah apabila indeks theil semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar, demikian pula sebaliknya apabila indeks theil

semakin kecil maka ketimpangan semakin kecil. Indeks theil tidak memiliki batas atas sehingga angka indeks theil dapat melebihi dari satu.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah berperan dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa publik yang tak dapat disediakan sektor swasta. John Maynard Keynes dalam teorinya mengatakan bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan.

Barang publik memiliki ciri khas yaitu tersedianya adalah karena campur tangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang relatif murah (karena harga disubsidi pemerintah), tidak dapat dikecualikan (*non-excludable*), karena dapat dinikmati oleh orang lain dan tidak pula bersaing (*non-rival*). Dalam hal ini fokus penelitian pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ketiga elemen ini sangat penting dan pemerintah bertanggungjawab dalam hal menyediakan sarana dan prasarana ini untuk publik/masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkat pemerintahan (Jr. & Johnson, 1998).

Klasifikasi belanja publik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan klasifikasi belanja sebagai berikut: 1) belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja, 2) klasifikasi belanja menurut organisasi

disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. 3) klasifikasi menurut fungsi terdiri dari; klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah, klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.

Sedangkan menurut panduan yang dikeluarkan oleh *Government Finance Statistivs Manual* oleh IMF (1986) klasifikasi belanja publik dapat dikategorikan berdasar berbagai macam kriteria yaitu sebagai berikut: 1) belanja jasa publik umum 2) belanja pertahanan, 3) belanja perlindungan umum, 4) belanja urusan ekonomi, 5) belanja perlindungan lingkungan, 6) belanja perumahan dan *public utilities* 7) belanja kesehatan, 8) belanja rekreasi, budaya, dan agama 9) belanja pendidikan, 10) belanja perlindungan sosial.

2.1.3 Investasi

Investasi adalah pengeluaran yang menambah stok modal untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa atau pendapatan di masa yang akan datang. Stok modal yang dimaksud adalah pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama yang digunakan untuk proses produksi (Dornbusch & Fisher, 2004).

Smith dalam Deliarnov (2005) menjelaskan cara terbaik untuk melakukan investasi adalah membeli mesin-mesin dan peralatan, adanya mesin modern tentu akan membuat produktivitas tenaga kerja meningkat. Peningkatan produktivitas mengakibatkan produksi yang dilakukan akan bertambah sehingga akan meningkatkan profit yang didapatkan.

Jika arus investasi ke suatu negara berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang ada. Selanjutnya, peningkatan stok kapital ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan produksi yang menambah aktivitas perekonomian negara tersebut (Rizal, 2014).

Fatihudin (2019) dalam bukunya menjelaskan bahwa peranan pemerintah menjadi sangat penting dalam investasi, karena dalam melakukan investasi diperlukan sebuah iklim investasi yang baik untuk investor seperti tata ruang, gangguan lingkungan, dan ketertiban umum di daerah. Oleh karenanya perlu rekomendasi dari pemerintah sebelum investor melakukan investasi di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Fatihudin (2019) menjelaskan jenis-jenis investasi ialah sebagai berikut:

a. Investasi otonom (*Autonomous investment*)

Investasi otonom adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi pendapatan, tidak dapat berubah oleh karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor diluar pendapatan. Faktor-faktor lain pendapatan yang memengaruhi tingkat investasi seperti itu misalnya tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, harapan pengusaha, dan sebagainya. Teknologi dapat mengubah investasi, misalnya kemajuan teknologi perang menyebabkan banyak negara menanamkan modalnya di bidang militer. Kebijakan pemerintah dalam penerapan aliran listrik untuk daerah terpencil, walaupun

GNP tidak mengalami perubahan, investasi tersebut tetap dilakukan.

b. Investasi terimbas (*Induced investment*)

Investasi ini sangat dipengaruhi tingkat pendapatan. Secara fungsional dinyatakan bahwa tingkat investasi dengan tingkat pendapatan terdapat hubungan positif. Investasi total yang dilakukan dalam suatu perekonomian adalah komposit dari investasi otonom ditambah investasi terimbas yang merupakan dari fungsi pendapatan.

c. Investasi publik (*Public investment*)

Investasi atau penanaman modal dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, investasinya diarahkan untuk melayani atau menciptakan kesejahteraan rakyat banyak.

d. Investasi swasta (*Private investment*)

investasi yang dilaksanakan swasta, motif keuntungan di masa depan sangat berperan dalam menentukan volume investasi.

e. Investasi dalam negeri (*Domestic investment*)

Penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh investor domestik atau dalam negeri

f. Investasi luar negeri (*Foreign investment*)

Investasi luar negeri adalah penanaman modal asing. Negara yang banyak memiliki banyak faktor produksi alam (natural resources) dan atau manusia (human resources), tetapi tidak memiliki banyak modal (capital), akan mengundang pemodal asing agar sumber daya tersebut dapat dioptimalkan.

g. *Gross investment*

Investasi yang dihitung dari penjumlahan melalui investasi otonom dan investasi terimbas.

h. *Net Investment*

Investasi yang dihitung dengan penyusutan yang berlaku dalam investasi

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah sebuah indikator yang mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai alat untuk mengukur aspek kualitas dari pembangunan dan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang serta untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Badan Pusat Statistik, 2022). Konsep IPM ini pertama kali dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yang kemudian hingga saat ini indikator IPM digunakan secara berkala untuk melihat kualitas pembangunan. Nilai indeks pembangunan IPM berkisar 0-100 yang nilainya diklasifikasikan sebagai berikut;

- <60 status IPM rendah
- $60 \leq \text{IPM} < 70$ status IPM sedang
- $70 \leq \text{IPM} < 80$ status IPM tinggi
- ≥ 80 status IPM sangat tinggi

Komponen yang ada dalam IPM terdiri dari tiga dimensi dasar yaitu, pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak. Dari pengukuran yang digunakan

Badan Pusat Statistik yang telah mengikuti standar *United Nation Development Programme* (UNDP) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada dimensi pendidikan digunakan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas, lalu untuk dimensi kesehatan umur harapan hidup saat lahir (UHH) serta untuk dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran perkapita: 96 Komoditas Paritas Daya Beli.

Indikator IPM sangat penting untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam pembangunan, Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang mumpuni akan mempengaruhi kemampuan manusia untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi modern sehingga produktivitas semakin meningkat. Salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana aktivitas perekonomian yang ada di daerah lebih maju dan modern untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan memproduksi (Patta,2012).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Wilayah

Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dimana penelitian yang dilakukan Harun & Ghozali (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berperan signifikan untuk mengurangi

ketimpangan wilayah. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pemerintah melakukan belanja pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Christi & Nugroho dengan judul “ Analisis Ketimpangan Antar Wilayah di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya” (2020) menemukan bahwa belanja tidak langsung memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah sedangkan belanja langsung tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah.

Perkembangan suatu wilayah juga bergantung pada pengelolaan pengeluaran pemerintah, pemerintah memiliki anggaran untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan suatu perencanaan yang matang dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota untuk menyukseskan program kerja dan rencana yang sudah dibentuk untuk kemaslahatan masyarakat.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Wilayah

Penelitian yang dilakukan oleh Barika (2012) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009” Menemukan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barika, Istiqomah (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi (PMA) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2011-2016)” Menemukan pengaruh investasi terhadap

ketimpangan wilayah di Pulau Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, investasi yang kurang merata menjadi salah satu sebab terjadinya ketimpangan wilayah. Apabila investasi terpusat di suatu wilayah akan menyebabkan wilayah lainnya akan tertinggal dari sisi produksi barang dan jasa, yang dimana investasi memiliki pengaruh vital untuk meningkatkan kapasitas wilayah dalam memproduksi barang dan jasa sehingga perekonomian akan berkembang.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Barika dengan Istiqomah. Mansyur (2020) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan” menemukan pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan ialah negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Wilayah

Penelitian yang dilakukan Dita dkk (2020) menemukan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah ini karena indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, semakin sejahtera masyarakat maka kondisi wilayah dapat dikatakan maju.

Kemudian penelitian yang dilakukan Ghifara dkk (2022) meneliti dampak ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia di negara dengan ekonomi yang berkembang, hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara ketimpangan pendapatan dengan indeks pembangunan manusia yang dimana semakin tinggi ketimpangan pendapatan maka semakin sedikit

orang yang mampu mengakses kesehatan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya sehingga indeks pembangunan manusia akan menurun. Ketimpangan pendapatan yang tinggi juga bisa dipicu oleh masalah pengalokasian anggaran yang kurang optimal.

Lalu Ferreira dkk. (2022) melakukan studi yang mengkompilasi penelitian terkait dampak ketimpangan dengan judul "*On the Impact of Inequality on Growth, Human Development, and Governance*" pembahasan penelitian ini terkait dampak ketimpangan terhadap indeks pembangunan manusia dan juga ke pemerintah, ia menjelaskan bahwa dampak ketimpangan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia menjadi rendah diakibatkan penduduk memiliki pendapatan yang rendah sehingga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan kesehatan dengan baik, kemudian efek ketimpangan yang tinggi akan menyebabkan tingkat kriminalitas yang meningkat diakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang memberikan kebijakan yang terlalu memihak kepada orang-orang kaya sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

2.3 Studi Empiris

Berikut ini peneliti menyajikan studi empiris atau tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berupa jurnal dan skripsi yang ditulis oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

| No | Nama (Tahun) | Judul Penelitian | Metode Analisis | Variabel yang digunakan | Hasil Penelitian |
|----|---|--|-------------------------|---|--|
| 1. | Iszur Maulana Sabililah Ramadhan (2020) | Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Jawa Timur (2011-2017) | Regresi Linear Berganda | 1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Investasi 3. Pertumbuhan ekonomi | IPM dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan |

| No | Nama (Tahun) | Judul Penelitian | Metode Analisis | Variabel yang digunakan | Hasil Penelitian |
|----|---|--|-------------------------|---|---|
| 2. | Kurniati Mansyur, Nursini, Hamrullah (2020) | Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan | Regresi Linear Berganda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Investasi 3. Pengeluaran Pemerintah | Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan |
| 3. | Ferry Sutiono (2018) | Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015) | Regresi Data Panel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal K/L 2. Belanja Modal APBD | Belanja Modal K/L berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan untuk belanja modal APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan |

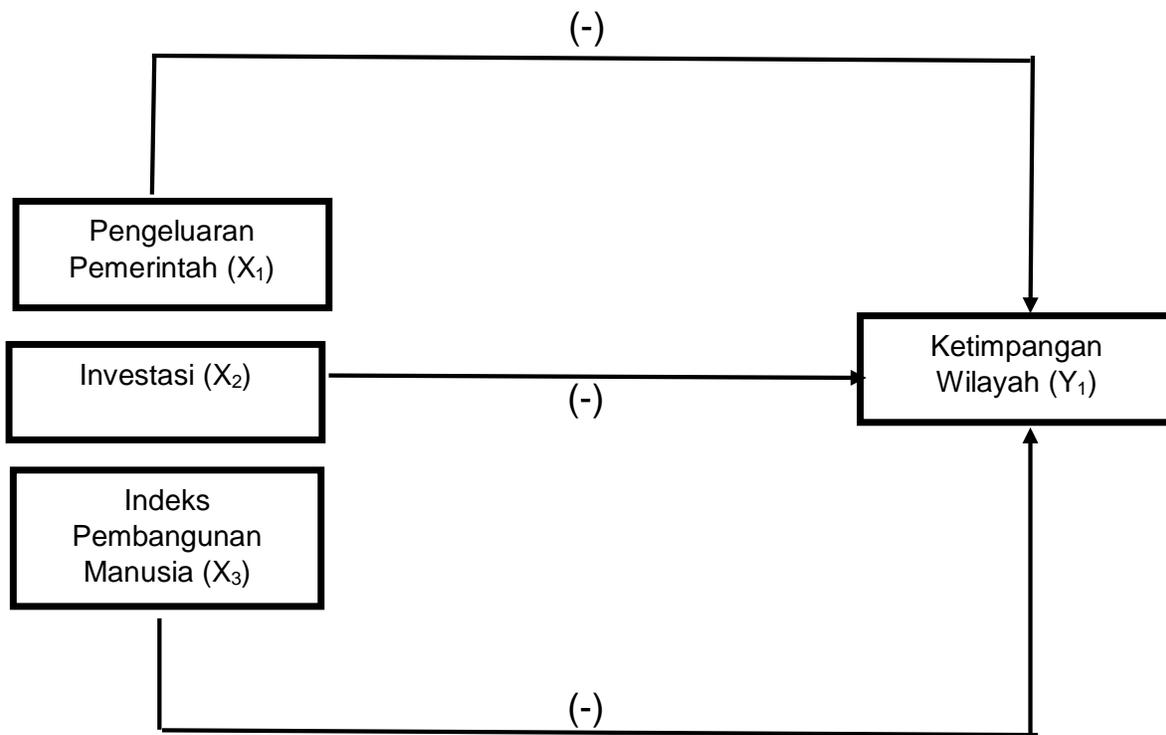
| No | Nama (Tahun) | Judul Penelitian | Metode Analisis | Variabel yang digunakan | Hasil Penelitian |
|----|--|---|--------------------|--|--|
| 4. | Regita Dita Zusanti, Hadi Sasana, Rusmijati (2020) | Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa 2010-2018 | Regresi Data Panel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Tingkat Pengangguran Terbuka | IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan, sedangkan TPT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah |
| 6. | Lukman Harun, Ghozali Maski (2012) | Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2011-2017) | Regresi Data Panel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Pemerintah 2. Pertumbuhan Ekonomi | Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. |

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis menyusun kerangka konseptual dengan variabel independen ialah pengeluaran pemerintah (X_1), indeks pembangunan manusia (X_2), dan investasi (X_3), sedangkan variabel dependen ketimpangan wilayah (Y_1) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel ini merupakan variabel penting yang mempengaruhi kondisi ketimpangan wilayah, oleh karena itu dengan meneliti ini maka dapat menjadi referensi serta informasi baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dibawah ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, studi terdahulu, dan kerangka konseptual maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan .
2. Diduga investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.